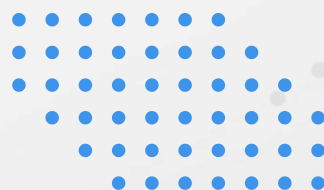




**DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KLATEN**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



# 2025

*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*



Jl. Teratai No. 02 Kampung Pondok, Klaten



(0272) 321647



dispermasdes@klaten.go.id



dinpermasdes.klaten.go.id

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Isu-isu Strategis .....	1
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD.....	15
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	17
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	18
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025 .....	18

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	21
3.2 Realisasi Anggaran .....	29

### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	32
4.2 Rekomendasi.....	33

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.2 : Capaian Kinerja .....	22
Tabel 3.1.4 : Realisasi Capaian Kinerja .....	25
Tabel 3.2.1 : Capaian Kinerja Keuangan .....	29

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Klaten, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, laporan ini menyajikan tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Telah Dikoreksi Oleh	Tanggal	Paraf

Klaten, 15 Januari 2026

Pimpinan Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa



Dra. WAHYUNI SRI RAHAYU, M.Si,  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196707221993122002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Proses penyusunan LKJIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, LKJIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

### **1.2 Isu-isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis yang telah diidentifikasi untuk dipilih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Mendukung pemerintah daerah kab. Klaten dalam usaha pengentasan kemiskinan ekstrim melalui kegiatan-kegiatan pemberayaan masyarakat dan desa.
2. Meningkatkan indeks desa membangun (IDM) Kab. Klaten menjadi mandiri.
3. Mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Penurunan Angka Stunting.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pembangunan di desa.

### **1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

#### **1.3.1. Dukungan SDM**

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompetensi. Pada tahun 2025, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten didukung oleh pegawai yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 18 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.3.1.1**

**Data Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2025 (DATA PER 31 DES  
2025)**

<b>1</b>	<b>Jumlah Total ASN (PNS + PPPK)</b>	:	18	Orang
<b>2</b>	<b>PNS</b>			
	<b>Kualifikasi Pendidikan</b>			
	a)	SD	:	Orang
	b)	SLTP	:	Orang
	c)	SLTA	:	3 Orang
	d)	Diploma	:	Orang
	e)	S- 1	:	7 Orang
	f)	S- 2 / S-3	:	7 Orang
	<b>Pangkat dan Golongan</b>			
	a)	Juru Muda	:	Orang
	b)	Juru Muda Tk I	:	Orang
	c)	Juru	:	Orang
	d)	Juru Tk I	:	Orang
	e)	Pengatur Muda	:	Orang
	f)	Pengatur Muda Tk I	:	Orang
	g)	Pengatur	:	Orang
	h)	Pengatur Tk I	:	2 Orang
	i)	Penata Muda	:	1 Orang
	j)	Penata Muda Tk I	:	1 Orang
	k)	Penata	:	3 Orang
	l)	Penata Tk I	:	4 Orang
	m)	Pembina	:	4 Orang
	n)	Pembina Tk I	:	1 Orang
	o)	Pembina Utama Muda	:	1 Orang
	p)	Pembina Utama Madya	:	Orang
	r)	Pembina Utama	:	Orang
<b>3</b>	<b>PPPK</b>	:	1	Orang

**1.3.2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana kantor merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Sarana dan prasarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktifitas

pegawai. Adapun sarana dan prasarana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten menurut jenisnya sebagai berikut :

**Tabel 1.3.2.1**

**Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>JENIS ASET /BARANG</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>	<b>KET</b>
1	Mainframe (Komputer Jaringan)	1 unit	-
2	P.C Unit	10 unit	1 rusak
3	Lap Top	18 unit	-
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17 unit	-
5	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4 unit	-
6	Station Wagon	6 unit	-
7	Sepeda Motor	13 unit	-
8	T R I P O D	4 unit	-
9	Lemari Kerja	24 unit	1 rusak berat
10	Buffet	3 unit	1 rusak berat
11	Rak Besi dan Kayu	13 unit	2 rusak berat
12	Filing Cabinet Besi	31 unit	2 rusak
13	Brandkas	1 unit	-
14	Mesin Absensi	1 unit	-
15	CCTV	1 unit	-
16	LCD Projector/Infocus	6 unit	-
17	White Board	3 unit	1 rusak berat
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4 unit	-
19	Papan Pengumuman	1 unit	-
20	Meja Resepsionis	1 unit	-
21	Meja Kerja Kayu	4 unit	-
22	Meja 1/2 Biro	47 unit	-
23	Kursi Besi dan Kayu	257 unit	14 rusak berat
24	Kursi Rapat	6 unit	5 rusak berat
25	Kursi Putar	11 unit	-
26	Bangku Tunggu	3 unit	-
27	Kursi Lipat	1 unit	-
28	Meja Komputer	4 unit	-
29	Sice	5 unit	-
30	Meja Rapat	10 unit	-
31	Jam Mekanis	1 unit	-
32	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 unit	-
33	Lemari Es	1 unit	-
34	Air Conditioner	14 unit	-
35	Kipas Angin	6 unit	-
36	Wireless	1 unit	-
37	Microphone Table Stand	2 unit	-

38	Televisi	6 unit	-
39	Tustel	2 unit	-
40	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4 unit	-
41	Dispenser	1 unit	-
42	Handy Cam	1 unit	-
43	Amplifier	2 unit	-
44	Loudspeaker	8 unit	-
45	Bracket Standing Peralatan	4 unit	-
46	Alat Pemadam/Portable	5 unit	-
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	-
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 unit	-
49	Microphone/Wireless MIC	21 unit	-
50	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 unit	-
51	Telephone (PABX)	1 unit	-
52	Facsimile	1 unit	-
53	Telephone Mobile	1 unit	-
54	Exhaust Fan	2 unit	-
55	Alat Pembakaran	8 unit	-
56	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	4 unit	-
57	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6 unit	-
58	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2 unit	-
59	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1 unit	-
60	Taman Permanen	1 unit	-
61	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit	-
62	Pagar Permanen	1 unit	-
63	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1 unit	-

### 1.3.3. Anggaran

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp 12.623.317.960 dari total pagu sebesar Rp. 14.561.696.371. Pencapaian sasaran strategis di atas sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program, kegiatan dan sub kegiatan dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2025 beserta anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

**Tabel 1.3.3.1**

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100</b>	<b>Realisasi Fisik (%)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4,485,779,115.00</b>	<b>3,262,637,686.00</b>	<b>73</b>	<b>100</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3,920,519,000.00</b>	<b>2,743,275,408.00</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang/bulan	19	Orang/bulan	59.38	3,920,519,000.00	2,743,275,408.00	70	100
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>241,742,727.00</b>	<b>220,995,590.00</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	10,000,000.00	4,598,250.00	46	100

b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100	50,128,367.00	47,591,910.00	95	100
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100	30,155,360.00	21,559,300.00	71	100
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dokumen	48	Dokumen	100	5,000,000.00	3,162,000.00	63	100
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	100	78,959,000.00	76,825,430.00	97	100
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	67,500,000.00	67,258,700.00	100	100
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>164,541,000.00</b>	<b>146,643,410.00</b>	<b>89</b>	<b>100</b>
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	3,500,000.00	2,020,000.00	58	100
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	55,000,000.00	48,819,640.00	89	100

c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	106,041,000.00	95,803,770.00	90	100
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	100	%	100	%	<b>100</b>	158,976,388.00	151,723,278.00	95	100
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	Unit	22	Unit	100	70,377,999.00	68,731,918.00	98	100
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	15	Unit	100	88,598,389.00	82,991,360.00	94	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>55,129,080.00</b>	<b>54,718,250.00</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
1	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>Persentase desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>55,129,080.00</b>	<b>54,718,250.00</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
a	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	55,129,080.00	54,718,250.00	99	100

C	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>7,231,569,647.00</b>	<b>6,557,285,156.00</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
		<b>Persentase BUMDes berkembang dan Maju</b>	<b>21.23</b>	<b>%</b>	<b>14,83</b>	<b>%</b>	<b>69.87</b>				
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	7,11	%	26,04	%	366,2	7,231,569,647.00	6,557,285,156.00	91	100
a	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3,927,996,562.00	3,848,482,827.00	98	100
b	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2	Dokumen	2	Dokumen	100	149,429,563.00	91,596,330.00	61	100
c	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	29,613,500.00	27,566,230.00	93	100
d	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	800	Orang	1050	Orang	2100	2,160,847,350.00	1,940,597,068.00	90	100

e	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2	Dokumen	2	Dokumen	100	160,003,236.00	126,217,080.00	79	100
f	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	Laporan	1	Laporan	100	10,000,000.00	8,368,300.00	84	100
g	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	Laporan	0	Laporan	#DIV/0!	235,420,663.00		-	0
h	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	391	Dokumen	391	Dokumen	100	97,827,333.00	86,914,180.00	89	100
i	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	26	Dokumen	26	Dokumen	100	16,030,120.00	15,185,600.00	95	100
j	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	225	Orang	650	Orang	288,89	206,917,920.00	186,915,841.00	90	100

k	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	150	Desa	150	Desa	100	197,749,000.00	189,346,250.00	96	100
l	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	39,734,400.00	36,095,450.00	91	100
D	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Posyandu aktif</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2,789,218,529.00</b>	<b>2,748,676,868.00</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
		<b>Persentase Posyantek aktif</b>	<b>33.33</b>	<b>%</b>	<b>46.15</b>	<b>%</b>	<b>138.46</b>				
		<b>Presentase PKK Aktif</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				
1	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PKK yang dilakukan pembinaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2,789,218,529.00</b>	<b>2,748,676,868.00</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

		<b>Persentase Posyantek yang dilakukan pembinaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				
		<b>Persentase Kelompok Pelestarian Adat Istiadat yang terfasilitasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				
		<b>Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				
a	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Dokumen	1	Dokumen	100	62,490,200.00	61,860,700.00	99	100
b	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	Lembaga	5	Lembaga	100	1,771,353,101.00	1,765,279,550.00	100	100

c	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	Laporan	2	Laporan	100	137,385,260.00	135,809,048.00	99	100
d	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2	Laporan	2	Laporan	100	117,989,968.00	117,712,650.00	100	100
e	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dokumen	1	Dokumen	100	700,000,000.00	668,014,920.00	95	100

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2025 yang terdiri dari IV (empat) Bab, dengan uraian sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, penyusunan LKJIP tahun 2025, gambaran singkat tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi struktur organisasi, peran dan isu strategis, sistematika penyusunan LKJIP serta tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten tahun 2024.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan tentang Rencana Strategis (Renstra) OPD, penjabaran misi dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025;
- b. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 berdasarkan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten 2021-2026;
- c. Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

### **BAB IV Penutup**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten tahun 2025 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD**

Memuat penjelasan singkat mengenai Rencana Strategis yang terdiri dari :

1. Visi : Mewujudkan klaten yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.
2. Misi : Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera)
3. Tujuan & Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Desa Membangun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya status berkembangnya desa, dengan indikator kinerja sasaran adalah :
  - a. Persentase pengentasan desa tertinggal
  - b. Persentase peningkatan status desa mandiri

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa, dengan indikator kinerja sasaran adalah :
  - a. Persentase desa mandiri

Tujuan, sasaran serta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.1.1****Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Klaten 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat			Indeks Desa Membangun	0,6894	0,6914	0,6934	0,6954	0,6974
		1.1	Meningkatnya status berkembangnya desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	14,29	16,67	20	50	100
				Persentase peningkatan status desa mandiri	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38

**Tabel 2.1.2****Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Klaten 2025-2029**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			Indeks Desa	0,7447	0,7466	0,7473	0,7480	0,7490
		1.1	Meningkatnya desa berstatus mandiri	Persentase Desa Mandiri	18,67	21,74	22,76	23,79	25,32

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Desa Membangun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya status berkembangnya desa, dengan indikator kinerja sasaran adalah :
  - a. Persentase pengentasan desa tertinggal.
  - b. Persentase peningkatan status desa mandiri.

Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.2.1**

### **Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten**

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya status berkembangnya desa	Melibatkan intervensi langsung pada infrakstruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas pemerintah desa. Peningkatan status desa mandiri dilakukan dengan memperkuat sektor ekonomi lokal, mengembangkan kapasitas kelembagaan desa, dan mendotong desa untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya.	Berfokus pada pembangunan desa secara holistic, yang mencakup pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya. Kebijakan ini mendukung peran aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memprioritaskan keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta dalam menciptakan desa yang lebih mandiri, maju dan sejahtera.

		Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dengan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan aset desa; memperkuat tata kelola BUMDes dalam pengembangan potensi unggulan desa, dan mengembangkan kerjasama antar desa.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan pedesaan.
--	--	--	--

### 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

**Tabel 2.3.2**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>TARGET 2025</b>	<b>Anggaran</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	4.485.779.115
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	100	55.129.080
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase BUMDes berkembang dan maju	21,23	7.231.569.647
	Prosentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	100	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase PKK aktif	100	2.789.218.529
	Prosentase Posyandu aktif	100	
	Prosentase Posyantek aktif	33,33	

### 2.4 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan komitmen dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten untuk mencapai target indikator sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel. Perjanjian Kinerja Eselon III merupakan komitmen dari kepala bidang untuk mencapai target indikator program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD yang mendukung pencapaian indikator sasaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.

Sedangkan Perjanjian Kinerja Sub Koordinator merupakan komitmen dari para Sub Koordinator untuk melaksanakan semua kegiatan yang diampu, sehingga realisasi capaian program bisa tercapai. Rincian Perjanjian Kinerja baik Eselon II, Eselon III maupun Sub Koordinator pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten tahun 2025 tersebut dalam lampiran laporan ini.

**Tabel 2.4.1**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tujuan: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6934
	Sasaran : Meningkatnya status berkembangnya desa	Presentase pengentasan desa tertinggal	%	20

		Presentase peningkatan status desa mandiri	%	0,37
--	--	--	---	------

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,01	Sangat Tinggi	
2	75,01 ≤ 90,00%	Tinggi	
3	65,01 ≤ 75,00%	Sedang	
4	50,01 ≤ 65,00%	Rendah	
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah	

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Kinerja organisasi menunjukkan capaian yang baik, ditandai dengan terpenuhinya sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari seluruh indikator kinerja utama, mayoritas indikator mencapai target, bahkan beberapa di antaranya melampaui target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja organisasi.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. Selain itu, penerapan monitoring dan evaluasi secara berkala turut berperan dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, serta kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Terhadap capaian tersebut, organisasi telah melakukan analisis dan merumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai dasar peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Menyajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini;

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2025**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2021-2026	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,6934	N/A	N/A
2	Sasaran: Meningkatnya status berkembangnya desa	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal	50	100	100
		Presentase peningkatan status desa mandiri	0,37	3,06	44,35

Indeks Desa Membangun sudah tidak dilakukan perhitungan di tahun 2025, indikator penggantinya adalah Indeks Desa dengan realisasi 74,6110 atau dengan capaian sebesar 100 %. Data capaian Indeks Desa dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Pada persentase pengentasan desa tertinggal mencapai 100 % dari target dan persentase peningkatan status desa mandiri mencapai 44,35 % melebihi dari target kinerja. Data realisasi kinerja tersebut diperoleh dari dokumen renstra dan data dari Tenaga Ahli.

Faktor internal & eksternal yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan.

Sasaran strategis : Meningkatkan status berkembangnya desa

Indikator : Presentase Pengentasan Desa Tertinggal

Presentase peningkatan status desa mandiri

- Penyebab Keberhasilan

- a) Akses masyarakat terhadap layanan sosial dasar pendidikan (TK, SD, SMP) sangat mudah secara waktu tempuh dan jarak, serta angka partisipasi murni anak sekolah tinggi (>80-100%)
- b) Akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan (posyandu, Polindes, Puskesmas) sangat mudah dijangkau oleh masyarakat
- c) Ketersediaan air minum warga sangat mudah dengan adanya sumur dan PDAM
- d) Terdapat kegiatan social masyarakat yang masih terjaga sampai dengan saat ini seperti gotong royong, sosial budaya, olahraga, mitigasi penanganan konflik dan satkamling
- e) Terdapat fasilitas umum bagi masyarakat seperti fasilitas olahraga antara lain lapangan sepakbola
- f) Terdapat fasilitas pendukung perekonomian antara lain pertokoan, pasar, kedai rumah makan serta akses yang sangat mudah bagi masyarakat
- g) Sudah terdapat Lembaga ekonomi di desa (Bumdes) dan terdapat layanan keuangan di desa seperti KUR
- h) Sudah ada pengelolaan sampah di tingkat desa
- Penyebab Kegagalan
  - a) Akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan tingkat SMA masih dirasa kurang secara jarak dan waktu tempuh
  - b) Layanan tenaga Kesehatan selain bidan di desa sangat terbatas
  - c) Prosentase keanggotaan BPJS masih rendah
  - d) Belum semua desa terdapat fasilitas taman bacaan, dan ruang publik terbuka
  - e) Belum ada prooduk unggulan desa serta ekonomi kreatif di desa
  - f) Akses terhadap Pendidikan non formal masih kurang dan tidak terdapat layanan lembaga Pendidikan non formal di desa
  - g) Belum terdapat penginapan di desa
- Alternatif Solusi yang Sudah Dilakukan
  - a) Peningkatan layanan sosial dasar baik Pendidikan maupun kesehtan dari perbaikan sarana prasarana maupun jam kerja pelayanan
  - b) Identifikasi potensi terkait produk unggulan desa dalah satunya melalui kegiatan ketahan pangan
- Rencana Tindak Lanjut
  - Pengawalan perencanaan kegiatan untuk meningkatkan status desa dalam penyusunan dokumen RKPDesa dan APBDesa

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2026-2029	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan: Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	0,7447	74,6110	100
2	Sasaran: Meningkatnya desa berstatus mandiri	Persentase Desa Mandiri	18,67	19,44	104,12

Faktor internal & eksternal yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan.)

Sasaran strategis : Meningkatkan desa berstatus mandiri

Indikator : Persentase Desa Mandiri

- Penyebab Keberhasilan

Adanya pemahaman tentang pendataan indeks desa maksud, tujuan, tahapan pendataan, serta manfaat pendataan indeks desa

Desa sudah melakukan pendataan sesuai dengan kuisisioner dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan

- Penyebab Kegagalan

Tim Pendata masih belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuisisioner

Masih ada data desa yang belum sinkron

- Alternatif Solusi yang Sudah Dilakukan

Penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuisisioner sehingga pemahamannya sama

Desa sudah melaksanakan update data sebelum diinput dalam web indeks desa

- Rencana Tindak Lanjut

Mendorong desa yang statusnya maju untuk meningkatkan status ke mandiri dengan melakukan perencanaan kegiatan yang bisa menaikkan nilai indeks desa

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

**Tabel 1.3.4.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan 3 Tahun terakhir**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Tujuan: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,6934	N/A	0,7286	0,7160	0,7034
2	Sasaran: Meningkatnya status berkembangnya desa	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal	50	100	100	100	100
		Presentase peningkatan status desa mandiri	0,37	3,06	6,9	1,10	1,53

a. Indeks Desa Membangun (IDM)

Data yang diperoleh dari Tenaga Ahli dalam tiga tahun terakhir (2022, 2023, 2024) untuk capaian Indeks Desa Membangun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal tersebut, karena adanya faktor pendorong yaitu : adanya sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Sehingga desa dapat berkembang dari kategori tertinggal menuju desa mandiri yang berdaya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, pada tahun ini perhitungan Indeks Desa Membangun sudah tidak dilakukan kembali, berganti dengan Indeks Desa dengan capaian 74,6110. Data indeks Desa diukur berdasarkan dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintah.

b. Presentase Pengentasan Desa Tertinggal

Perencanaan target prosentase pengentasan desa tertinggal pada Tahun 2025 adalah pada tahun tersebut sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sejak tahun 2022 di Kabupaten Klaten sudah tidak ada lagi status desa tertinggal. Keberhasilan tersebut didorong oleh dukungan kebijakan, alokasi dana desa, dan sinergi antara

pemerintah pusat, daerah, dan desa.

c. Presentase peningkatan status desa mandiri

Perencanaan capaian status desa mandiri pada tahun 2025 adalah :

- Pada tahun 2025 tercapai sebanyak 76 desa mandiri.
- Pada tahun 2025 tercapai sebanyak 78 desa berkembang.

Dari data tahun 2022, 2023, 2024 untuk capaian peningkatan status desa mandiri pada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dari 1,53 untuk tahun 2022 dan 1,10 untuk tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan masih banyak persepsi dari kepala desa bahwa apabila desa menjadi desa mandiri akan berdampak turunnya besaran anggaran dana desa, sehingga masih banyak desa enggan untuk menggunakan data yang sesuai dengan kondisi riil. Untuk capaian tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu dari 1,10 untuk tahun 2023 dan 6,9 untuk tahun 2024. Realisasi di tahun 2025 adalah 3,06 dengan capaian 44,35%. Hal tersebut dikarenakan sudah ada pemahaman dari kepala desa bahwa desa mandiri akan mendapatkan reward berupa tambahan anggaran alokasi kinerja, maka banyak desa mudah diajak menggunakan data yang sesuai dengan kondisi riil.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

**Tabel 1.3.6.**

**Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2026	Realisasi 2025	Capaian %
1	Tujuan: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,6974	N/A	N/A
2	Sasaran: Meningkatnya	Presentase Pengentasan	50	100	100

	status berkembangnya desa	Desa Tertinggal			
		Presentase peningkatan status desa mandiri	0,37	3,06	44,35

Capaian Indeks Desa Membangun pada tahun 2025 adalah 100 % karena sudah tidak dilakukan penghitungan. Pada persentase pengentasan desa tertinggal mencapai 100 % dari target renstra dan persentase peningkatan status desa mandiri mencapai 44,35 % melebihi dari target dokumen renstra sebesar 0,37 %.

**Tabel 1.3.7.**

**Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2025-2029**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2026	Realisasi 2025	Capaian %
1	Tujuan: Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	0,7466	74,6110	100
2	Sasaran: Meningkatnya desa berstatus mandiri	Persentase Desa Mandiri	21,74	19,44	89,42

Capaian Indeks Desa pada tahun 2025 sebesar 74,6110 melebihi target renstra yaitu 0,7466. Pada persentase desa mandiri mencapai 19,44 % melebihi dari target dokumen renstra 2025-2029 sebesar 18,67 %.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Target/Standar Provinsi/ Nasional/Internasional (jika ada)

**Tabel 1.3.8**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Standar Provinsi/ Nasional/Internasional	Realisasi 2025	Keterangan

1	Tujuan: Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	20,72	74,61	Standar Nasional
2	Sasaran: Meningkatnya desa berstatus mandiri	Persentase Desa Mandiri	20,72	100	Standar Nasional

Capaian Indeks Desa Nasional pada tahun 2025 sebesar 74,61 % sesuai dengan data dari Kementerian Desa.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

**Tabel 1.3.9**

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Tujuan: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	0,6974	N/A	N/A	14.56 1.696 .371, 00	12.62 3.317. 960,0 0	86,69	13,31 %
2	Sasaran: Meningkatnya status berkembangnya desa							
	-Presentase Pengentasan Desa Tertinggal	50	100	100	7.286 .698. 727,0 0	6.612. 003.4 06,00	95	5 %
	- Presentase peningkatan status desa mandiri	0,37	3,06	44,35	2.789 .218. 529,0 0	2.748. 676.8 68	99	1 %

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Tujuan: Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	0,7466	74,611	100	14.561.696.371,00	12.623.317.960,00	86,69	13,31 %
2	Sasaran: Meningkatnya desa berstatus mandiri							
	Persentase Desa Mandiri	18,67	19,44	104,12	10.075.917.256,00	9.360.680.274	96,33	3,67 %

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis dan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp14.561.696.371,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Klaten. Realisasi total anggaran tahun 2025 sebesar Rp12.623.317.960,- atau sebesar 86,69%.

**Tabel 3.2.1**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
I	Program Peningkatan Kerjasama Desa	100	100	100	55,129,080.00	54,718,250.00	99	1 %

1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	100	100	100	55,129,080.00	54,718,250.00	99	1 %
II	Program Administrasi Pemerintahan Desa				7,231,569,647.00	6,557,285,156.00	91	9 %
	Prosentase BUMDes berkembang dan maju	21,23	14,83	69,85				
	Prosentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	100	100	100				
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7	7	100	7,231,569,647.00	6,557,285,156.00	91	9 %
III	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				2,789,218,529.00	2,748,676,868.00	99	1 %
	Prosentase PKK aktif	100	100	100				
	Prosentase Posyandu aktif	100	100	100				
	Prosentase Posyantek aktif	33,33	46,15	138,46				
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga	100	100	100	2,789,218,529.00	2,748,676,868.00	99	1 %

Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							
--	--	--	--	--	--	--	--

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2025 sudah melaksanakan instruksi pemerintah dengan melakukan efisiensi anggaran, serta menganggarkan kegiatan yang lebih prioritas. Kondisi Dispermasdes tahun 2025 hanya tersedia 18 ASN, dengan kondisi tersebut tentunya tidak seimbang dengan tugas pokok dan fungsinya. Agar tuisi berjalan dengan ketersediaan yang ada maka setiap pegawai tidak hanya mengampu pada satu pekerjaan. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten yang merupakan bentuk laporan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Memperhatikan data pencapaian kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat tinggi. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian %	Keterangan
1	Tujuan: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6974	N/A	N/A	IDM sudah tidak dilakukan perhitungan di tahun 2025, indikator penggantinya adalah Indeks Desa (ID) dengan nilai tahun 2025 sebesar 74,61.
2	Sasaran: Meningkatnya status berkembangnya desa	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	50	100	100	Sangat Tinggi

		Presentase peningkatan status desa mandiri	%	0,37	3,06	44,35	Sangat Tinggi
--	--	--	---	------	------	-------	---------------

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian %	Keterangan
1	Tujuan: Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	Indeks	0,7466	74,6110	100	Sangat Tinggi
2	Sasaran: Meningkatnya desa berstatus mandiri	Persentase Desa Mandiri	%	18,67	19,44	104,12	Sangat Tinggi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **B. REKOMENDASI**

1. Mengadakan sosialisasi kepada desa bahwa apabila desa mandiri mendapatkan reward berupa tambahan anggaran alokasi kinerja.
2. Akan dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Akan dilakukan komitmen seluruh jajaran akan pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas agar mencapai sasaran dan tujuan yang strategis.
4. Melakukan review terhadap dokumen perencanaan baik dari substansi sasaran dan indikator sasaran.

# **LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Teratai No. 02 Kampung Pondok, Klaten, Jawa Tengah Kode Pos 57411  
Telepon (0272) 321647, Faksimile (0272) 321647, Laman [https:// dinpermasdes.klaten.go.id](https://dinpermasdes.klaten.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. WAHYUNI SRI RAHAYU, M.Si.  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HAMENANG WAJAR ISMOYO  
Jabatan : Bupati Klaten

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
HAMENANG WAJAR ISMOYO

Klaten, 20 Februari 2025  
Pihak Pertama,  
  
Dra. WAHYUNI SRI RAHAYU, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196707221993122002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Status Berkembangnya Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal (di Kabupaten Klaten sudah tidak ada Desa Tertinggal)	100
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0.38

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.535.913.525,00	APBD Kab.
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 96.979.000,00	APBD Kab.
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 5.497.592.000,00	APBD Kab.
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.847.450.000,00	APBD Kab.



**HAMENANG WAJAR ISMOYO**

Klaten, 20 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Klaten



**Dra. WAHYUNI SRI RAHAYU, M.Si.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP-196707221993122002



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Teratai Nomor 02 Kampung Pondok, Klaten, Jawa Tengah 57411 Telepon  
(0272) 321647, Faksimile 321647, Laman [https : dinpermasdes.klaten.go.id](https://dinpermasdes.klaten.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR 01 TAHUN 2026**

TENTANG  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu segera menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu segera menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2026;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Renana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2018;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan penekanan pelaksanaan RPJMD yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan penjelasan mengenai formulasi pengukuran, tipe penghitungan dan sumber data.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan untuk :

1. Perencanaan jangka menengah;
2. Perencanaan tahunan ;
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 9 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Klaten



**Dra. WAHYUNI SRI RAHAYU, M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670722 199312 2 002

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten  
Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KLATEN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Indeks Desa	0,7473
1.	Meningkatnya status berkembangnya desa	Persentase Desa Mandiri	21,76%

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten



**Dra. WAHYUNI SRI RAHAYU, M.Si.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670722-199312 2 002

## Penghargaan

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Wiyata Darma Muda Bunda PAUD Kab/Kota	Ny. Fahrani Hamenang	Menteri Dalam Negeri
2	Juara I Lomba Vlog PKK Sekretariat “Bukan Sekedar Arisan”	Sih Winanti TP PKK Desa Kemudo Kec. Prambanan Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
3	Juara Harapan I Lomba Vlog PKK Sekretariat “Bukan Sekedar Arisan”	Kusmiyati TP PKK Desa Bogem Kec. Bayat	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
4	Juara Harapan II Lomba Vlog PKK Sekretariat “Bukan Sekedar Arisan”	Novita Kesiyarinni TP PKK Desa Pundungan Kec. Juwiring	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
5	Juara III Lomba Vlog Pokja I Bentengi Keluarga dari Bahaya Narkoba	Yulita Eka Safitri TP PKK Desa Nangsri Kec. Manisrenggo Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
6	Juara Harapan I Lomba Vlog Pokja I Bentengi Keluarga dari Bahaya Narkoba	TP PKK Desa Dompnyongan Kec. Jogonalan Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
7	Juara III Lomba Vlog Pokja II “Dari Sisa Jadi Cuan”	Nurul Khasanah TP PKK Desa Ketandan Kec Klaten Utara Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
8	Juara Harapan I Lomba Vlog Pokja II “Dari Sisa Jadi Cuan”	Sofi Putri K TP PKK Desa Juwiring Kec. Juwiring Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
9	Juara Harapan III Lomba Vlog Pokja II “Dari Sisa Jadi Cuan”	Diah Dwi Winarni TP PKK Desa Blimbing Kec. Karangnongko Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
10	Juara II Lomba Vlog Pokja III “Fesyen Berkelanjutan Tanpa Sambah ( Zero Waste )	Sofi Wildan P TP PKK Desa Janti Kec. Polanharjo Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
11	Juara III Lomba Vlog Pokja IV “ Cegah Anemia Sejak Dini, untuk Remaja Sehat, Cerdas dan Berdaya”	Sri Wulan H TP PKK Desa Bendungan Kec. Cawas Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah

12	Juara Harapan III Lomba Vlog Pokja IV “Cegah Anemia Sejak Dini, untuk Remaja Sehat, Cerdas dan Berdaya“	Yuliatuni Widati TP PKK Desa Tanjung Kec. Juwiring Kab Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
13	Juara Harapan III Lomba Vlog Pokja IV “Cegah Anemia Sejak Dini, untuk Remaja Sehat, Cerdas dan Berdaya“	Yuliatuni Widati TP PKK Desa Tanjung Kec. Juwiring Kab Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
14	Juara III Lomba Vlog Pokja II “Dari Sisa Jadi Cuan“	Nurul Khasanah TP PKK Desa Ketandan Kec Klaten Utara Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
15	Juara Harapan I Lomba Vlog Pokja II “Dari Sisa Jadi Cuan“	Sofi Putri K TP PKK Desa Juwiring Kec. Juwiring Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
16	Juara Harapan III Lomba Vlog Pokja II “Dari Sisa Jadi Cuan“	Diah Dwi Winarni TP PKK Desa Blimbing Kec. Karangnongko Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
17	Juara II Lomba Vlog Pokja III “Fesyen Berkelanjutan Tanpa Sambah ( Zero Waste )	Sofi Wildan P TP PKK Desa Janti Kec. Polanharjo Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
18	Juara II Lomba Vlog Pokja IV “Cegah Anemia Sejak Dini, untuk Remaja Sehat, Cerdas dan Berdaya“	Anik Sri Martanti TP PKK Kel. Jatinom Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
19	Juara III Lomba Vlog Pokja IV “Cegah Anemia Sejak Dini, untuk Remaja Sehat, Cerdas dan Berdaya“	Sri Wulan H TP PKK Desa Bendungan Kec. Cawas Kab. Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
20	Juara Harapan III Lomba Vlog Pokja IV “Cegah Anemia Sejak Dini, untuk Remaja Sehat, Cerdas dan Berdaya“	Yuliatuni Widati TP PKK Desa Tanjung Kec. Juwiring Kab Klaten	Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
21	Peringkat V “Bunda PAUD Kabupaten / Kecamatan	NUNIK HENDRI PAMUKAS Kec. Tulung, Kabupaten Klaten	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah
22	Peringkat IV “Bunda PAUD Desa / Kelurahan	AFIANI PURNANINGTYAS Desa Merbung, Klaten Selatan, Klaten	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah

23	Bunda PAUD Kecamatan (Peduli)	NUNIK HENDRI PAMUKAS Bunda PAUD Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah
24	Bunda PAUD Kecamatan (Peduli)	V. RETNO SETYANINGSIH, SKM., MMR Bunda PAUD Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah
25	Bunda PAUD Kecamatan (Peduli)	JETTY KUSUMANINGSIH DWI KARYATI, S.Sos., MM Bunda PAUD Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah
26	Bunda PAUD Kecamatan (Peduli)	GAYTRI SUSILANARNI Bunda PAUD Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah
27	Bunda PAUD Desa/Kelurahan (Peduli)	AFIANI PURNANINGTYAS Bunda PAUD Desa Merbung, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah
28	Bunda PAUD Desa/Kelurahan (Peduli)	ETIK KURNIAWATI, S.PD.I Bunda PAUD Desa Glagah, Kec. Jatinom, Kab. Klaten	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah
29	Bunda PAUD Desa/Kelurahan (Peduli)	ERNA YULI HASTUTI Bunda PAUD Desa Duwet, Kec. Wonosari, Kab. Klaten	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah
30	Bunda PAUD Desa/Kelurahan (Peduli)	WIWIK HARJANTI Bunda PAUD Desa Kanoman, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah
31	Bunda PAUD Desa/Kelurahan (Peduli)	ATTI NURYANTI Bunda PAUD Desa Sorogaten, Kec. Tulung, Kab. Klaten	Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah